



PEMERINTAH  
KABUPATEN BONE

# RENJA

## RENCANA KERJA KECAMATAN LAPPARIAJA



TAHUN  
2023



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**BUPATI BONE,**



*[Handwritten signature]*  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



*[Handwritten signature]*  
**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lappariaja Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

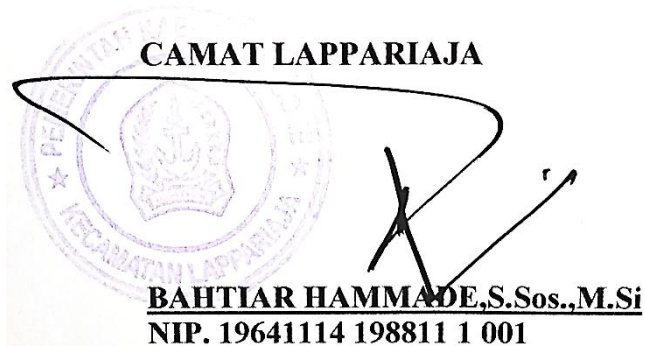
Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencana Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motifasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai visi dan misi. Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari kerja sama, integritas moral dan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat.

Lappariaja, 25 Juli 2022


**CAMAT LAPPARIAJA**



**BAHTIAR HAMMADE, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19641114 198811 1 001**


## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS & FUNGSI PD .....	14
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	17
2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT .....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	22
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	22
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH .....	23
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	25
BAB V PENUTUP .....	29
LAMPIRAN	
1. Cascading Kinerja.	
2. Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja Kecamatan Lappariaja Tahun 2023 (Cetakan SIPD).	



LAMPIRAN LV  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2023

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN LAPPARIAJA  
KABUPATEN BONE  
TAHUN 2023**



## BAB I

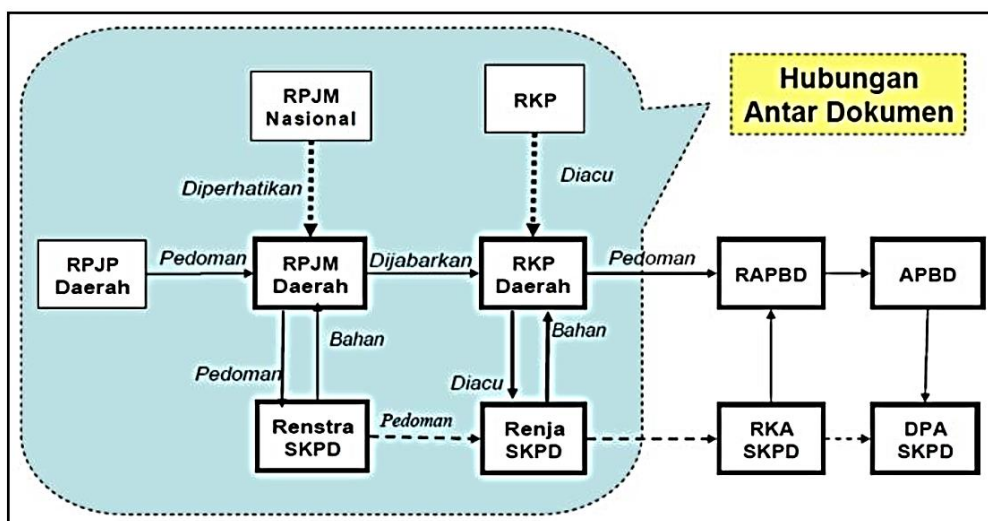
### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Renja SKPD Kecamatan Lappariaja secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda SKPD dan rencana resmi daerah ( RK SKPD, RPJMD dan Renstra SKPD ) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses

Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( Stakeholder ) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom-Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Kerja 1 (satu) tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lappariaja Tahun Kerja 2023 didasarkan pada :

- a. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 44211);
- d. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- e. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- k. Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 );
- m. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Nomor 9) Tahun 2021;
- n. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencan Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- o. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Berita Daerah Kabupaten Nomor 108 Tahun 2021;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **❖ Maksud**

Maksud penyusunan Rencana kerja ( RENJA) kecamatan Lappariaja adalah Sbb:

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparaturnya Kecamatan Lappariaja dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat tercapai;
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Lappariaja Tahun 2023;
- Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023;
- Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lappariaja.

#### **❖ Tujuan**

Adapun Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lappariaja adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Lappariaja dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
- Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan Kecamatan Lappariaja
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar instansi di Kecamatan Lappariaja.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Renja Kantor Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Tahun 2023, adalah memuat visi, misi, tujuan ,strategi ,kebijakan, program,dan kegiatan, pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Lappariaja.

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, disusun secara sistematika Rencana Kerja Kantor Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan ,Bab ini berisi tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja ,Dasar Hukum,Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan, Bab ini menguraikan kajian terhadap review terhadap hasil pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan,Analisa Kinerja Pelayanan,isu-isu Penting tentang Tupoksi Pegawai kantor Camat Lappariaja serta Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III, Tujuan dan sasaran , Bab ini memuat tentang Telaahan terhadap kebijakan pemerintah,Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan serta Program dan Kegiatan Kecamatn Lappariaja dalam Kurung waktu satu Tahun Anggaran

Bab IV, Bab Ini memuat tentang Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan

Bab V, Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH***

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan renja sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan ( Masyarakat, Pemerintah Maupun Dunia Usaha ) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Lappariaja khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2020 dan APBD Kabupaten Bone dan dituangkan kedalam tabel T-C. 29 berikut ini:

**Tabel T-C.29**  
**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAPPARIAJA DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN LAPPARIAJA S/D TAHUN 2023**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE**

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN LAPPARIAJA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Kecamatan tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	0	0					60%
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100							67%
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan yang tersusun (Dokumen)	21	0	7	7	100%	7	14	67%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah (Laporan)	9	0	3	3	100%	3	6	67%
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaa Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100							33%
1	Pnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan Per Bulan bagi ASN Perangkat Daerah ASN (Bulan)	36	0	12	12	100%	12	12	33%
7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	100							50%
.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	2	0	0	0	0%	1	1	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Kecamatan tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaa Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100							67%
2	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	3	0	1	1	100%	1	2	67%
7.01.01.2.0 6	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100							64%
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	216	0	72	72	100%	72	144	67%
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai,Rapat dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Paket)	9	0	3	3	100%	3	6	67%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai kebutuhan (Paket)	3	0	1	1	100%	1	2	67%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (Paket)	3	0	1	1	100%	1	2	67%
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	240	0	80	50	63%	80	130	54%
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah LAPoran Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100							21%
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional (unit)	3	0	1	0	0%	1	0	0%
5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	13	0	4	0	0%	4	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Kecamatan tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran (Paket)	13	0	4	2	50%	3	5	38%
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	13	0	4	2	50%	4	6	46%
<b>7.01.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>							<b>76%</b>
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai rencana kebutuhan (Rekening)	108	0	36	36	100%	36	72	67%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	7	0	7	6	86%	7	6	86%
<b>7.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>							<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (Unit)	5	0	5	2	40%	5	5	100%
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	1	0	1	1	100%	1	1	100%
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)</b>	<b>100</b>							<b>50%</b>
<b>7.01.02.2.0 1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan</b>	<b>100</b>							<b>50%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Kecamatan tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan (Kegiatan)	2	0	1	0	0%	1	1	50%
7.01.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)</b>	<b>100</b>							67%
7.01.03.2.0 1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan</b>	<b>100</b>							67%
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan)	6	0	2	2	100%	2	4	67%
7.01.04	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)</b>	<b>100</b>							67%
7.01.04.2.0 1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>							67%
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonseia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinegritas dengan kepolisian NKRI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	9	0	3	3	100%	3	6	67%
7.01.06	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa (%)</b>	<b>100</b>							67%
7.01.06.2.0 1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100</b>							67%
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa (Laporan)	27	0	9	9	100%	9	18	67%
17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (Laporan)	27	0	9	9	100%	9	18	67%

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja pelayanan administrasi yang diselenggarakan pada Kantor Camat Lappariaja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatnya Kualitas dan Wawasan Aparatur
4. Peningkatan Serta Pemutakhiran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Kualitas dan Pemutakhiran Data di Desa/Kelurahan.
6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur di Desa/Kelurahan.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
  - ❖ Struktur organisasi Kantor Camat Lappariaja Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
  - ❖ Situasi Kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (Team Work).
  - ❖ Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
  - ❖ Sarana dan prasarana kerja di kantor Camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
  - ❖ Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi perangkat daerah terkait.
  - ❖ Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan Bupati

2. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja adalah :
- ❖ Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
  - ❖ Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah.
  - ❖ Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat computer.
  - ❖ Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
  - ❖ Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
  - ❖ Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Lappariaja terutama pada jajaran Kasubag yang masih banyak kosong.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Lappariaja yang dijabarkan kedalam tabel T-C. 30 sebagai berikut :



**Tabel T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LAPPARIAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021/K	Tahun 2022/K	Tahun 2023/K	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip			B	A	A	B	B	A	
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan			98	99	100	98	71	100	

### **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Secara umum isu – isu penting / strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lappariaja adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku jabatan fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Lappariaja.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Lappariaja sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Lappariaja harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lappariaja

- Permasalahan pada Sekretariat
  - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
  - b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
  - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
  - d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
  - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
  - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
  - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
  - d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;

- e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
  - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
  - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.
  - d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
  - e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
  - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
  - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
  - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
  - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
  - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
  - f. Data penerima rastra belum akurat;
  - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
  - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
  - a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
  - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
  - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
  - d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
  - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
  - f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;

- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
  - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
  - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
  - c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
  - d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang biasa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Lappariaja harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.
- Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Lappariaja dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antarlain :

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Lappariaja sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran penjabaran dari RPJMD .

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bone dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Lappariaja dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Semuanya itu dituangkan kedalam tabel T-C.31 berikut ini :

**Tabel T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**KECAMATAN LAPPARIAJA**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec.Lappariaja	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11,562,174,227	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec.Lappariaja	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah (%)	78%	10,325,415,924	Kepmen No.050-5889
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec.Lappariaja	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	67,000,000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec.Lappariaja	Persentase Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	66,771,040	Kepmen No.050-5889
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec.Lappariaja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan yang tersusun (Dokumen)	7	36,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec.Lappariaja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	35,937,180	Kepmen No.050-5889
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kec.Lappariaja	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah (Laporan)	4	31,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi	4	30,833,860	Kepmen No.050-5889
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	11,000,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Lappariaja	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	9,964,444,984	Kepmen No.050-5889
1	Phnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Lappariaja	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan Per Bulan bagi ASN Perangkat Daerah ASN (Bulan)	126	11,000,000,000	Phnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Lappariaja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	126	9,964,444,984	Kepmen No.050-5889
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	100	9,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Lappariaja	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	9,000,000	Kepmen No.050-5889
.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Lappariaja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	1	9,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Lappariaja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	9,000,000	Kepmen No.050-5889
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	15,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Lappariaja	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0%	0	Kepmen No.050-5889
2	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	1	15,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	0	-	Kepmen No.050-5889
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	204,548,827	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Lappariaja	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93%	110,360,930	Kepmen No.050-5889
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	72	21,229,450	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	48	12,751,150	Kepmen No.050-5889
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai, Rapat dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Paket)	3	55,616,767	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	48,119,780	Kepmen No.050-5889

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Lappariaja	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai kebutuhan (Paket)	1	5,124,350	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4,650,000	Kepmen No.050-5889
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.Lappariaja	Jumlah paket penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (Paket)	2	7,500,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.Lappariaja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3,600,000	Kepmen No.050-5889
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Lappariaja	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	80	115,078,260	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	80	41,240,000	Kepmen No.050-5889
7.01.0 1.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Lappariaja	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>125,635,800</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Lappariaja	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>60%</b>	<b>77,431,550</b>	Kepmen No.050-5889
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Lappariaja	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional (unit)	1	40,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Lappariaja	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	25,000,000	Kepmen No.050-5889
5	Pengadaan Mebel	Kec.Lappariaja	Jumlah pengadaan meubeleur kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	5	30,746,100	Pengadaan Mebel	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	16,578,400	Kepmen No.050-5889
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lappariaja	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran (Paket)	5	30,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lappariaja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	26,101,150	Kepmen No.050-5889
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kec.Lappariaja	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	5	24,889,700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kec.Lappariaja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	9,752,000	Kepmen No.050-5889
7.01.0 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec.Lappariaja	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>68,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec.Lappariaja	<b>Persentase Pembayaran Tagihan Bulan dan Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>83%</b>	<b>50,854,800</b>	Kepmen No.050-5889
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Lappariaja	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai rencana kebutuhan (Rekening)	36	18,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	7,868,400	Kepmen No.050-5889
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Lappariaja	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	12	50,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	42,986,400	Kepmen No.050-5889
7.01.0 1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec.Lappariaja	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>81,989,600</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec.Lappariaja	<b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>46,552,620</b>	Kepmen No.050-5889
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Lappariaja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (Unit)	5	58,564,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Lappariaja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	41,559,000	Kepmen No.050-5889
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Lappariaja	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	1	23,425,600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Lappariaja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Direhabilitasi) (Unit)	1	4,993,620	Kepmen No.050-5889
7.01.0 2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kec.Lappariaja	<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>21,961,500</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kec.Lappariaja	<b>Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16,220,490</b>	Kepmen No.050-5889

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Lappariaja	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	100	21,961,500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Lappariaja	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100%	16,220,490	Kepmen No.050-5889
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait	Kec.Lappariaja	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan (Kegiatan)	1	21,961,500	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait (Laporan)	1	16,220,490	Kepmen No.050-5889
7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec.Lappariaja	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	40,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec.Lappariaja	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	15,000,000	Kepmen No.050-5889
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Lappariaja	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	100	40,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Lappariaja	Persentase kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	100%	15,000,000	Kepmen No.050-5889
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Lappariaja	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan)	2	40,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	15,000,000	Kepmen No.050-5889
7.01.0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lappariaja	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	39,530,700	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lappariaja	Persentase Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100%	27,000,000	Kepmen No.050-5889
7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lappariaja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	39,530,700	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lappariaja	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	27,000,000	Kepmen No.050-5889
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Lappariaja	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	12	39,530,700	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	27,000,000	Kepmen No.050-5889
7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec.Lappariaja	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa (%)	100	34,450,470	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec.Lappariaja	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	50%	8,846,570	Kepmen No.050-5889
7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec.Lappariaja	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	34,450,470	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec.Lappariaja	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50%	8,846,570	Kepmen No.050-5889
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Lappariaja	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa (Laporan)	9	10,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Lappariaja	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Laporan)	0	-	Kepmen No.050-5889
17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Lappariaja	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (Laporan)	9	24,450,470	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Lappariaja	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	9	8,846,570	Kepmen No.050-5889



## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Pemerintah Kecamatan Lappariaja dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut ***Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif ( SMPP )*** yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat ( Top Down ) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah ( Button Up ) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sesuai tema Tahun 2023 adalah “ *Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Mandiri Berdaya Saing dan Berkelanjutan*”

Adapun Prioritas Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 disajikan dalam table berikut ini :

NO	NASIONAL	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE
1	Rancangan Teknikratik RPJMN 2020-2024	Perbaikan tata Kelola Pemerintahan dan Pelkayanan Publik	Peningkatan pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas
2		Penguatan Infrastruktur wilayah	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3		Pengembangan Kawasan Pusat pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan ,kehatan dan social dasar lainnya
4		Penurunan kesenjangan social Ekonomi	Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada Desa dan Kawasan pedesaan
5		Pembangunan Manusia	Pengembangan Inovasi daerah untuk mendukung pembangunan Daerah dan pelayanan public
6		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha
7		Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan,ketertiban,ketentra man dalam kemajemukan masyarakat

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bone maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kecamatan adalah Merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) Tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone adalah:

a. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan , yaitu suatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Lappariaja dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun yang akan datang. berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kantor Kecamatan Lappariaja adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi Kecamatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Lappariaja. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu dengan kebijakan yang telah digariskan dan berpedoman pada tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan Lappariaja maka ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Lappariaja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH:
  - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
    - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan kabupaten serta pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan ( pagu indikatif ) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2023 dituangkan pada Tabel-C.33.berikut ini :

**Tabel T-C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lappariaja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				10,392,482,984				11,668,116,897
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	10,325,415,924				11,542,174,227
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	66,771,040				53,000,000
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja,	7 Dokumen	35,937,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	36,000,000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bone, Lappariaja,	4 Laporan	30,833,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	17,000,000
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	9,964,444,984				11,000,000,000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Lappariaja,	126 Orang/	9,964,444,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	11,000,000,000
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	9,000,000				9,000,000
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bone, Lappariaja,	1 Dokumen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	9,000,000
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	110,360,930				204,548,827
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	48 Paket	12,751,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		100 Persen	21,229,450
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	3 Paket	48,119,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	55,616,767
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengeandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengeandaan yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	1 Paket	4,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	5,124,350
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	2 Dokumen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	7,500,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bone, Lappariaja,	80 Laporan	41,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	115,078,260

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	77,431,550				125,635,800
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	1 Unit	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	40,000,000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	2 Unit	16,578,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	30,746,100
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	3 Unit	26,101,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	30,000,000
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	2 Unit	9,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	24,889,700
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pembayaran Tagihan Bulan dan Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	50,854,800				68,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	24 Laporan	7,868,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	18,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Lappariaja,	12 Laporan	42,986,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	50,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	46,552,620				81,989,600
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Kab. Bone, Lappariaja,	4 Unit	41,559,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	58,564,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bone, Lappariaja,	1 Unit	4,993,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	23,425,600
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	16,220,490				21,961,500
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	16,220,490				21,961,500
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bone, Lappariaja,	1 Laporan	16,220,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	21,961,500
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	15,000,000				40,000,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	15,000,000				40,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bone, Lappariaja,	2 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	27,000,000			39,530,700	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	27,000,000			39,530,700	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bone, Lappariaja,	12 Laporan	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	39,530,700	
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	8,846,570			24,450,470	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Lappariaja,	100 Persen	8,846,570			24,450,470	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Bone, Lappariaja,	9 Laporan	8,846,570	PENDAPATA ASLI DAERA (PAD)	100 Persen	24,450,470	
<b>TOTAL</b>					10,392,482,984			11,668,116,897	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Kecamatan Lappariaja Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2023 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Selanjutnya sebagai catatan penting bahwa, Renja Kecamatan Lappariaja Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan Kecamatan Lappariaja dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kantor Camat Lappariaja . tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.


Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaidah Kaidah Pelaksanaan dalam dokumen renja ini diharapkan seluruh kasubag dan kasi dalam menjalankan tupoksi agar menjadikan dokumen renja 2023 ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Lappariaja, 25 Juli 2022

**CAMAT LAPPARIAJA**



**BAHTIAR HAMMADE, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19641114 198811 1 001**

**CASCADING KECAMATAN LAPPARIAJA  
TAHUN 2022**

**VISI**

**Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**

**TUJUAN KECAMATAN**

Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja

**SASARAN**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

**INDIKATOR**

Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip

Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonseia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi kinerja SKPD				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
Administrasi umum perangkat daerah				
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				
Penyediaan bahan logistik kantor				
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**PENANGGUNG JAWAB**

Sekertaris Camat

Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Trantibum

Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Perekonomian PAD dan Kesra

Seksi PMD

Seksi PMD

Seksi Pelayanan Umum

Sub.Bagian Program dan Keuangan

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Leppangeng, 12 Februari 2022

Gamat LAPPARIAJA

**BAHTIAR HAMMADE, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19641114 198811 1 001



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lappariaja

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lappariaja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Daerah		Perangkat Daerah						Alokasi Umum		Daerah		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	100 %	48,119,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	55,616,767
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 %	4,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	5,124,350
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	7,500,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	80 Laporan	100 %	41,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	115,078,260
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>77,431,550</b>					<b>125,635,800</b>
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 %	16,578,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,746,100
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 %	26,101,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lappariaja

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lappariaja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Perangkat Daerah						Umum				
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 %	9,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	24,889,700
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>50,854,800</b>					<b>68,000,000</b>
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pembayaran Tagihan Bulan dan Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Laporan	100 %	7,868,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	18,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pembayaran Tagihan Bulan dan Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	42,986,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>46,552,620</b>					<b>81,989,600</b>
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 %	41,559,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	58,564,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 %	4,993,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	23,425,600
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>16,220,490</b>					<b>21,961,500</b>
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>16,220,490</b>					<b>21,961,500</b>
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 %	16,220,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	21,961,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lappariaja

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lappariaja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Vertikal Terkait		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>15,000,000</b>						<b>40,000,000</b>
<b>7 01 03 2.0 1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>15,000,000</b>						<b>40,000,000</b>
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	40,000,000	
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>27,000,000</b>					<b>39,530,700</b>	
<b>7 01 04 2.0 1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>27,000,000</b>					<b>39,530,700</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 Persen	39,530,700	
<b>7 01 06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>8,846,570</b>					<b>24,450,470</b>	
<b>7 01 06 2.0 1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>8,846,570</b>					<b>24,450,470</b>	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Lappariaja, Semua Kelurahan	100 Persen	9 Laporan	100 %	8,846,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100 Persen	24,450,470	
<b>TOTAL</b>									<b>10,392,482,984</b>					<b>11,668,116,897</b>	